

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bakhri, Syaiful, 2009, *Hukum Pembuktian: Dalam Praktik Peradilan Pidana*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum (P3IH), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Jakarta.
- Gosita, Arif, 2009, *Masalah Korban Kejahatan-Kumpulan Karangan*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2010, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, cet.5, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Mansur, M. Arief dan Gultom, 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Ed.1-2, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marmosudjono, Sukarton, 1989, *Penegakan Hukum Di Negara Perancis*, Pustaka Kartini, Jakarta
- Marzuki, Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2010, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Muhadar, Edi Abdullah, Husni Thamrin, 2009, *Perlindungan Saksi Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, CV. Putra Media Nusantara, Surabaya.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muladi, 2018, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, cet.1, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Hukum Acara Pidana-Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, edisi pertama, cet ke-1, PT. Alumni, Bandung.

_____. 2010, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoretis dan Praktik Peradilan*, CV. Mandar Maju, Bandung.

Poernomo, Bambang, 1986, *Pokok-pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981*, Liberty, Yogyakarta.

Pramukti, Angger Sigit dan Fuadi Primaharsya, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak, Pustaka Yustisia*, Yogyakarta

Rahardjo Satjipto Rahardjo, 1979, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung

Reksodiputro, Mardjono, 1999, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan dalam Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, UI Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta

Santoso, Topo dan Eva Achjani Ulfa, 2007, *Kriminologi*, cet. Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1995, *Dasar-Dasar Metode Penelitian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Soerjono dan Abdurrahman, 2005, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta

Suratman dan H. Phillips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.3, CV. Alfabeta, Bandung.

Syamsudin, M 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Waluyo, Bambang, 1992, *Sistem pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Wiyono, R 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143).

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 15352, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882).

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57).

Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-007/ I/ A/ JA/ 10/ 2016 tentang Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan, 2016, Kejaksaan Agung, Jakarta

Keputusan Jaksa Agung No. 24/ E/ Ejp/ 12/ 2019 Tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara, 2019, Kejaksaan Agung, Jakarta

C. Jurnal, Tesis, Skripsi, Makalah

Anggara, Erasmus A.T. Napitupulu, Alex Argo Hernowo, 2016, “Studi Implementasi Penanganan Anak di Pengadilan berdasarkan UU SPPA”, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta

Guðbrandsson Bragi (Director General of Kids Welfare Department) “Barnahus as Implemented in Iceland”, 2015, CBSS and COE Conference, Tallinn-Estonia

Hutapea, Shinta Dewi, 2012, “Kajian Yuridis Terhadap Keterangan Saksi Melalui Audio Visual (Teleconference) di Persidangan Perkara Pidana” *Tesis*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Ishaq, Salmah Novita, 2017, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual”, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar

Kurniawan, Sofiyan, Kepala Seksi Penyidikan Sub Direktorat Penyidikan dan Penindakan Ditjen Aptika Kementerian Kominfo “Teknis Forensik Digital Dalam Penanganan Barang Bukti Alat Bukti Elektronik“, 2019, disampaikan pada *In House Training Penanganan Kapasitas Jaksa dalam Penanganan Barang Bukti/ Alat Bukti Elektronik*, Manado, 9-11 April 2019

Primana, Stefani Dorchas, 2019, “Peran Psikolog Sebagai Dasar Keabsahan Keterangan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Tesis*, Magister Hukum Litigasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Nurlatu, Samsul 2018, “Kedudukan Anak Sebagai Pemberi Keterangan Saksi Dalam Perkara Pidana di Pengadilan Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981”, *Lex Crimen*, Vol. VII, No. 1, Jan-Mar 2018

Nur, Andi Charisma Putri Iskandar, 2019, Skripsi dengan judul “Kekuatan Pembuktian Keterangan Anak Saksi Dalam Persidangan Perkara Pidana”, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

D. Internet

“Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024”

https://www.bappenas.go.id/files/rpjm/Narasi%20RPJMN%20IV%202020-2024_Revisi%2028%20Juni%202019.pdf hlm. 107-108

diakses pada 2 Januari 2020

“Sustainable Development Goals” ,

<https://www.sdg2030indonesia.org/page/24-tujuan-enambelas>

diakses pada 2 Januari 2020

“National Society for the Prevention of Cruelty to Children”,

<https://www.nspcc.org.uk/what-is-child-abuse/types-of-abuse/grooming/#what-is> diakses pada 19 Februari 2020

Nancy Walker Perry & Bradley D. McAuliff “The Use of Videotaped Child Testimony: Public Policy Implications”, *Notre dame journal of law, ethics and public policy*,

<https://scholarship.law.nd.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1461&context=ndjlepp> diakses pada 20 Februari 2020

<https://kbbi.web.id/anak> diakses pada 22 Februari 2020

“Konvensi Hak Anak”,

<https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx>,

diakses pada 24 Februari 2020

“Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 65/ PUU-VIII/ 2010”,

https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_65%20PUU_TELAH_BACA.pdf diakses pada 18 Maret 2020

“Videotaped statements”, *National District Attorneys Association (2010b)*,

www.ndaa.org/pdf/Admissiblity%20of%20Videotaped%20Statements%20in%20Criminal%20Child%20Abuse%20Proceedings_2010.pdf

diakses pada 19 Maret 2020

“Special Measure”, <https://www.cps.gov.uk/legal-guidance/special-measures>

diakses pada 19 Maret 2020

National District Attorneys Association (2010b). Videotaped statements.

Diakses

dari

www.ndaa.org/pdf/Admissiblity%20of%20Videotaped%20Statement%20in%20Criminal%20Child%20Abuse%20Proceedings_2010.pdf

diakses pada 19 Maret 2020.

“The Children’s House in Iceland – ‘Barnahus’”
<http://www.bvs.is/media/forsida/Barnahus,-an-overview.pdf> diakses
pada 1 Juni 2020

“Sec.29 Rule On Examination Of A Child Witness” diakses dari
<https://www.chanrobles.com/childwitnessexamination.htm#.XuYMWkUzbIV> diakses pada 8 Juni 2020.

“Waspada grooming terhadap anak” diakses dari
<https://www.metrotvnews.com/play/kewCO96a-waspada-grooming-terhadap-anak>, 25 Juli 2019, pada 25 Juli 2020

“The Child Witness in the Courtroom”, Robert H. Pantell, Md, Faap,
Committee On Psychosocial Aspects Of Child And Family Health,
diakses dari
<https://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/139/3/e20164008.full.pdf>, pada 25 Juli 2020.

Pre-Recording Evidence Child and Other Vulnerable Witnesses” , Scottish
Government, Juni 2017, diakses dari
<https://www.gov.scot/publications/pre-recording-evidence-child-vulnerable-witnesses-consultation-analysis/> pada 26 Juli 2020